

ABSTRAK

PERAN PANWASLU KECAMATAN TERHADAP KEKOSONGAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA

(Studi Kasus di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Perspektif UU RI

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Sebagai Negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan proses dalam memilih pemimpin Negara. Proses tersebut disebut dengan Pemilu atau Pemilihan Umum. Agar Pemilu dapat berjalan baik dan sistematis dibutuhkan suatu lembaga pengawas untuk memonitoring jalannya tahapan pemilu supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran maka dibentuklah Panitia Pengawas Pemilu atau biasa disebut Panwaslu. Dalam hal ini Panwaslu Kelurahan/Desa Bangoan bertugas untuk melakukan pengawasan sampai dengan penyusunan laporan yang kemudian harus dilaporkan ke sekretariat Pawaslu kecamatan Kedungwaru. Namun dikarenakan terjadinya kekosongan pada tahapan pemutakhiran data pemilih sementara mengakibatkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas kelurahan/desa bangoan diambil alih oleh pengawas pemilihan umum kecamatan kedungwaru untuk sementara waktu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Panwaslu, Kecamatan, Desa